

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan suatu kajian terhadap penelitian yang sudah pernah dilakukan. Di bawah ini adalah tiga penelitian terdahulu yang dipilih penulis sebagai referensi untuk melakukan penelitian.

1. **Lucas (2020). Model Pemberdayaan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Hutan (Studi Kasus Desa Cupak, Kabupaten Jombang). Journal of Regional Economics Indonesia.**

Penelitian ini fokus pada kajian aktivitas mata pencaharian di Desa Cupak, yang memiliki karakter unik dalam menghadapi perubahan sosial yang memengaruhi pendapatan keluarga kurang mampu. Salah satu masalah utama yang dialami warga desa sekitar hutan adalah tingginya tingkat kemiskinan di daerah tersebut. Lebih dari 75% masyarakat Indonesia menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini memicu berbagai upaya untuk menerapkan pengelolaan hutan secara lestari, yang sekaligus bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk sekitar. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya peningkatan taraf hidup masyarakat

sering menemui kegagalan, disebabkan oleh kurangnya pendekatan yang luwes dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan situasi. Adapun persamaan dengan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu berfokus pada pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi dampak terhadap tingkat kemiskinan masyarakat sekitar hutan namun hutan tetap lestari untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat hutan. Sedangkan untuk perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni fokus dalam program pemberdayaan yang dilakukan. Jika pada penelitian ini berfokus pada pelaksanaan program industri anyaman pandan. Maka, fokus program pemberdayaan masyarakat yang akan diteliti dilakukan yaitu program pertanian berkelanjutan.

2. Robilaong dan Brillian (2022). Analisis Strategi Pemberdayaan Masyarakat Petani dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Jarangan, Kec.Rejoso, Kab.Pasuruan). Jurnal Ilmiah Pertanian Vol. 12 No. 1.

Studi ini mengkaji program pemberdayaan yang sudah dijalankan oleh komunitas petani di kawasan Desa Wisata bernama Desa Wisata Pasuruan Nyaman Sejuk Lestari (Dewi Paramastri). Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam program ini meliputi pertemuan rutin, pelatihan promosi dan pemasaran produk

pariwisata, serta pameran produk unggulan Desa Dewi Paramastri di acara Car Free Day (CFD) Pandaan. Faktor-faktor yang mendorong pemberdayaan petani di Dewi Paramastri antara lain adalah potensi alam dan produk lokal yang menarik, kualitas sumber daya manusia yang mendukung pengelolaan, motivasi tinggi dari warga setempat, fasilitas dan infrastruktur yang memadai, keberadaan lembaga pengelola wisata, serta tersedianya lahan yang dapat dikembangkan sebagai destinasi wisata. Partisipasi petani dalam program ini telah berjalan dengan baik dan efektif, yang dapat dilihat dari penerapan manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling) sebagai indikator keterlibatan. Tujuan utama program ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui peningkatan pendapatan ekonomi, yang diperoleh dari penjualan tiket wisata, paket wisata, dan produk lokal kepada para pengunjung. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan riset yang sedang dilakukan oleh peneliti dalam hal fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa hutan. Namun, keduanya berbeda dalam hal lokasi, di mana penelitian ini berpusat di Kabupaten Pasuruan, sementara penelitian peneliti berlangsung di empat desa di wilayah Malang Raya.

3. Roslinda dan Rianty (2021). Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Pada Program Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Sanggau.

Kajian ini menyoroti upaya peningkatan kapasitas masyarakat melalui program pemberdayaan yang diterapkan di kawasan Hutan Kemasyarakatan Kabupaten Sanggau. Inisiatif tersebut diinisiasi dengan dukungan dari instansi pemerintah dan organisasi non-pemerintah, yang bertujuan untuk memberdayakan warga dalam mengelola serta memanfaatkan potensi hutan secara berkelanjutan. Selain meningkatkan keterampilan masyarakat dalam pengelolaan hutan, program ini juga ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pemanfaatan hasil hutan. Ragam kegiatan pemberdayaan dilakukan sebagai strategi untuk memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengakses dan mengelola sumber daya alam yang tersedia. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada peningkatan kapasitas individu yang selaras dengan dukungan sistem kelembagaan yang kokoh. Perbedaannya terletak pada aktor pelaksana: penelitian ini didukung oleh pemerintah dan LSM, sedangkan dalam penelitian peneliti, fasilitator utama program pemberdayaan berasal dari pihak swasta atau perusahaan.

B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Manusia merupakan bagian dari makhluk sosial yang berada di muka bumi. Gabungan dari manusia disebut sebagai masyarakat. Masyarakat berasal dari bahasa Inggris yaitu "*society*" yang berarti "masyarakat". Sekelompok individu yang saling berhubungan dan berinteraksi demi mencapai tujuan bersama dan memiliki solidaritas sosial merupakan pengertian dari masyarakat Aryani (2023). Keberadaan masyarakat lahir dari dorongan emosi, pemikiran, dan keinginan individu untuk merespons lingkungan di sekitarnya (Prasetyo, 2020).

Menurut Afriansyah, dkk. (2022) pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan daya (*empowerment*) atau kekuatan (*strengthening*). Empowerment merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat yang diberikan kesempatan dan keleluasaan untuk mengatur serta menentukan keputusan sendiri dalam setiap tahapan proses pembangunan, agar tercipta rasa kepemilikan terhadap program yang dijalankan Prafitri (2023). Dengan tujuan sebagai usaha memandirikan, mengembangkan, dan menswadayakan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat.

Maka dari itu, pemberdayaan masyarakat memiliki arti yaitu proses dalam memandirikan, mengembangkan, dan

menswadayakan masyarakat yang sebelumnya tidak mampu menjadi mampu dan berdaya saing sebagai kekuatan nyata masyarakat, untuk meningkatkan ekonomi dan memperjuangkan nilai-nilai dan kepentingan di dalam beberapa aspek kehidupan Abidin dan Pandodo (2024).

Pemberdayaan masyarakat juga perlu didukung kekuatan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat berupa kepercayaan, keterikatan sosial, jejaring, norma, serta kerja sama Damanik (2019). Sehingga memudahkan dalam membimbing dan mengelola masyarakat serta mempermudah penyebaran pengetahuan kepada mereka. Dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

2. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Proses dalam pemberdayaan masyarakat tidak lepas dari tahapan-tahapan yang perlu dipersiapkan dan diperhitungkan secara maksimal untuk mencapai suatu tujuan. Adapun tahap pemberdayaan masyarakat menurut (Maruf, 2019), yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan: fase awal pelaksanaan, terdapat dua langkah utama yang perlu dijalankan. Langkah pertama berkaitan dengan penyiapan personel, yaitu merekrut tenaga fasilitator yang akan melakukan proses pemberdayaan masyarakat, yang perannya dijalankan oleh pendamping lapangan. Langkah

kedua adalah menyiapkan area atau wilayah yang akan dijadikan target kegiatan pemberdayaan.

- b. Tahap pengkajian (*assessment*): tahap pengkajian merupakan proses indentifikasi yang dilakukan secara individu atau kelompok berdasarkan isu-isu yang terjadi di lingkungan sosial. Tahap ini berfokus pada pengidentifikasian kebutuhan masyarakat serta potensi atau sumber daya yang mereka miliki, sekaligus menggali apa saja yang masih mereka perlukan. Petugas pada konteks ini, penting untuk mencoba mengenali persoalan serta kebutuhan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat (*feel needs*) dan juga sumber dayayang dimiliki oleh klien. Di tahap ini, penting untuk membangkitkan kesadaran, meningkatkan kapasitas, dan memberikan dukungan pemberdayaan yang dibutuhkan masyarakat guna mencapai kemajuan Wrihatnolo dan Dwidjowijoto dalam (Endah, 2020).
- c. Tahap perencanaan: pada tahap perencanaan ini, pendamping sebagai pelaku transformasi, secara aktif berupaya agar melibatkan masyarakat dalam memberikan ide dan memikirkan permasalahan yang dihadapi serta cara mengatasinya. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat mampu mengevaluasi berbagai pilihan program dan aktivitas yang layak untuk dijalankan.

- d. Tahap formalisasi rencana-aksi: di fase ini, *agent of change* atau agen perubahan membantu setiap kelompok dalam mengembangkan program dan kegiatan serta memutuskan mana kegiatan yang akan dikerjakan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Selain itu, fase ini juga berfungsi untuk membantu menuangkan idenya ke dalam tulisan, terutama jika membutuhkan proposal dukungan finansial.
- e. Tahap pelaksanaan (*implementasi*) program atau kegiatan: pada saat pelaksanaan berlangsung, dibutuhkan partisipasi dari masyarakat. Masyarakat pada tahap ini menjadi kader yang diperlukan agar program yang sudah diinisiasi tetap berjalan secara konsisten. Partisipasi masyarakat ini, sangatlah penting karena dapat menjadi penentu berjalannya suatu program pemberdayaan.
- f. Tahap evaluasi: evaluasi adalah langkah pengawasan yang dilakukan oleh pelaksana program pemberdayaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam jangka pendek, evaluasi ini biasanya bertujuan membentuk sistem pengawasan internal berbasis komunitas, sementara dalam jangka panjang, diharapkan mampu mempererat hubungan dan komunikasi antara semua pihak. Evaluasi dilakukan untuk memastikan agar pelaksanaan program pemberdayaan

menjalani proses sesuai dengan arah dan sasaran yang telah ditetapkan bersama.

- g. Tahap terminasi: tahap terminasi adalah fase di mana hubungan antara pelaksana program dan pihak yang diberdayakan secara resmi diakhiri. Terminasi ini dilakukan bukan karena masyarakat sudah mandiri melainkan program pemberdayaan ini telah melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Bagan 2.1 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat



Sumber: Data Diolah Tahun 2025

3. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Upaya untuk memperkuat kapasitas dan kemampuan masyarakat, mendorong terciptanya kemandirian, serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki agar mereka dapat berkembang dan bersaing dengan lingkungan luar merupakan fungsi dari Pemberdayaan Masyarakat menurut Almasri &

Deswimar (2014). Akan tetapi, keberhasilan proses pemberdayaan sangat bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat, mulai dari perencanaan hingga tahap evaluasi (Siwi, 2025).

Afriansyah, dkk. (2022) menjelaskan terdapat lima bentuk peran dalam upaya pemberdayaan masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perbaikan kelembagaan (*better institution*): Memperbaiki kelembagaannya merupakan bagian dari memperbaiki kegiatan yang akan dilakukan. Sebuah lembaga dapat dianggap berkembang apabila mampu memotivasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam berbagai aktivitas yang diselenggarakannya.
- b. Perbaikan usaha (*better business*): penguatan kelembagaan akan mendorong peningkatan dan perbaikan kegiatan usaha yang dijalankan, sehingga ke depannya mampu memberikan manfaat nyata bagi para anggota lembaga serta masyarakat di sekitarnya.
- c. Perbaikan pendapatan (*better income*): Peningkatan usaha diharapkan mampu meningkatkan penghasilan bagi semua anggota lembaga, termasuk warga sekitar. Untuk itu, dibutuhkan langkah-langkah dalam meningkatkan sistem pengelolaan penerimaan keuangan masyarakat.

- d. Perbaiki lingkungan (*better environment*): Peningkatan penghasilan diharapkan mampu membawa perubahan positif pada kondisi fisik dan sosial lingkungan, mengingat kerusakan lingkungan sering kali terjadi akibat rendahnya pendapatan atau kemiskinan.
- e. Perbaiki kehidupan (*better living*): Penghasilan yang memadai dan kondisi lingkungan yang sehat akan meningkatkan kualitas hidup Masyarakat. Hal ini tercermin melalui kondisi kesehatan, kualitas pendidikan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi ekonomi yang kuat akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

C. Masyarakat Desa Hutan

1. Konsep Masyarakat Desa Hutan

Masyarakat desa hutan merupakan komunitas yang berada di area kawasan hutan, yang memiliki keterikatan yang erat dengan sumber daya hutan merupakan masyarakat desa hutan menurut pendapat Forestry (2018). Mereka berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Masyarakat ini memiliki pengetahuan lokal yang berharga dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan dan memanfaatkan sumber daya secara bijaksana Panda (2024). Masyarakat desa hutan biasanya bergantung dengan adanya hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan

ekonomi mereka. Kegiatan yang dilakukan seperti pertanian dan pengumpulan hasil hutan non-kayu.

Pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan dan akses pasar menjadi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan mulai dari pengelolaan sumber daya alam, ekonomi, sosial, hingga budaya Bambang, dkk. (2023).

2. Karakteristik Masyarakat Desa Hutan

- a) Bergantung pada sumber daya hutan: masyarakat desa hutan pada umumnya memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sumber daya hutan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka memanfaatkan hasil hutan non-kayu seperti rotan, madu, getah, buah-buahan hutan, serta kayu untuk keperluan rumah tangga dan ekonomi. Ketergantungan ini tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga menyangkut aspek budaya dan spiritual masyarakat setempat (KLHK, 2020).
- b) Rendahnya tingkat pendidikan dan kesejahteraan ekonomi: secara umum, tingkat pendidikan masyarakat desa hutan masih tergolong rendah. Banyak warga yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar karena kendala ekonomi dan akses. Kondisi ini berpengaruh langsung terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat, yang sebagian besar bergantung pada pekerjaan informal seperti bertani, berburu,

dan mengumpulkan hasil hutan tanpa pengelolaan yang optimal (BPS, 2020).

- c) Struktur sosial komunal dan kuatnya ikatan sosial: kehidupan masyarakat desa hutan masih sangat dipengaruhi oleh sistem sosial komunal. Nilai-nilai kebersamaan seperti gotong royong, musyawarah mufakat, dan rasa tanggung jawab kolektif sangat dijunjung tinggi. Kekerabatan dan norma adat masih menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pengelolaan lahan dan hutan (KLHK, 2020)
- d) Keterlibatan dalam program perhutanan sosial: sejak diluncurkannya program Perhutanan Sosial oleh pemerintah, masyarakat desa hutan mulai difasilitasi untuk mengelola kawasan hutan secara legal. Melalui skema seperti Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan (HKm), dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), masyarakat diberi akses dan kewenangan untuk mengelola hutan dengan pendekatan keberlanjutan. Hal ini membuka peluang peningkatan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan (KLHK, 2020).
- e) Rentan terhadap konflik pengelola lahan dan hutan: Masyarakat desa hutan seringkali berada dalam posisi yang rentan terhadap konflik tenurial dan pengelolaan lahan. Ketidaksesuaian antara klaim masyarakat adat dengan batas-batas wilayah administrasi formal atau izin konsesi kepada

pihak ketiga (seperti perusahaan) menyebabkan munculnya konflik agraria. Kurangnya pengakuan hukum terhadap hak masyarakat lokal menjadi akar dari banyaknya sengketa lahan di kawasan hutan (Huma, 2019).

D. Konsep Kesejahteraan Sosial

1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang memungkinkan individu atau kelompok hidup layak dan sejahtera secara sosial, ekonomi, dan spiritual. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,

"Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya." (Pasal 1 Ayat 1)

Definisi ini menegaskan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya menekankan pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan sosial. Hal ini menjadikan kesejahteraan sosial sebagai tujuan pembangunan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

2. Aspek Kesejahteraan Sosial

Menurut Dwi (2023) kesejahteraan sosial tidak hanya fokus atau bergantung pada faktor ekonomi semata, tetapi juga pada hubungan dan dampak di berbagai aspek sebagai berikut:

- a. Ekologi atau lingkungan: meliputi upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan alam, keberlanjutan ekosistem, kualitas udara dan air yang terjaga, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup.
- b. Sosial: mencakup keharmonisan interaksi antarindividu, partisipasi aktif dalam kehidupan sosial, keberadaan jaringan dukungan antarwarga, rasa kebersamaan yang kuat, serta terciptanya kondisi yang adil dan setara bagi seluruh anggota masyarakat.
- c. Kesehatan: melibatkan ketersediaan layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan bermutu, kesejahteraan fisik dan mental, usia harapan hidup yang panjang, serta kemampuan menjalani gaya hidup sehat.
- d. Pendidikan: mengacu pada kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu, peluang memperoleh pengetahuan dan peningkatan keterampilan, tingkat kemampuan membaca dan menulis yang baik, serta akses pendidikan yang merata bagi semua.
- e. keadilan sosial: fokus pada pemerataan akses terhadap berbagai peluang dan sumber daya, upaya mengurangi jurang perbedaan sosial dan ekonomi, menjaga hak-hak dasar setiap individu, serta

mendorong penguatan posisi kelompok yang lemah dan kurang mendapat perhatian dalam masyarakat.

- f. Ekonomi: menggambarkan peluang untuk memperoleh pekerjaan yang manusiawi, penghasilan yang memadai, kecukupan dalam pemenuhan kebutuhan pokok, kondisi ekonomi yang aman, serta potensi individu untuk berkembang secara finansial.

3. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Menurut Setiawan (2019) memperbaiki taraf hidup secara holistik pada manusia yang mencakup beberapa aspek merupakan suatu tujuan dari pembangunan kesejahteraan sosial, antara lain:

- a. Peningkatan pada standar hidup masyarakat melalui serangkaian layanan sosial dan jaminan sosial yang ditujukan untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi golongan yang kurang berpeluang dan mudah terdampak sehingga membutuhkan adanya perlindungan sosial.
- b. Penguatan kapasitas masyarakat dengan membangun struktur serta organisasi dalam sektor ekonomi, sosial, dan politik yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap individu
- c. Mendorong terciptanya ruang kebebasan yang lebih luas melalui pemberian berbagai akses dan alternatif pilihan yang sejalan dengan keinginan, potensi individu, serta nilai-nilai kemanusiaan.

E. Relevansi Pemberdayaan Masyarakat dengan Pekerja Sosial

Menurut Andari (2020) pekerja sosial tidak terbatas pada profesi layanan kemanusiaan tetapi juga memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelayanan sosial sebagai landasan utama dalam mengatasi tren perkembangan dan permasalahan sosial yang semakin kompleks. Pekerjaan sosial dan pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan yang sejalan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, maupun komunitas yang selama ini mengalami keterpinggiran baik secara sosial, ekonomi, maupun kultural.

Keduanya berperan penting dalam menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan, dengan memberdayakan masyarakat agar mampu mengenali potensi diri, mengakses sumber daya yang ada, serta berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan. Pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari pendekatan pekerjaan sosial karena keduanya saling melengkapi, di mana pekerjaan sosial menyediakan dukungan emosional, advokasi, serta fasilitasi terhadap kelompok rentan, sedangkan pemberdayaan masyarakat menekankan pada penguatan kapasitas, kemandirian, dan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan. Dengan demikian, kolaborasi antara pekerjaan sosial dan upaya pemberdayaan menjadi strategi yang efektif

dalam meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh bagi individu dan masyarakat yang membutuhkan.

Pekerja sosial berfokus pada individu dan kelompok untuk mengatasi masalah sosial, sedangkan pemberdayaan masyarakat bertujuan membentuk kekuatan kepada masyarakat sehingga masyarakat tersebut dapat mengelola serta dapat mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi. Pendampingan terhadap masyarakat miskin namun memiliki kemampuan untuk berkompetitif dengan masyarakat lainnya merupakan peran dari pekerja sosial Hatu (2010). Adapun peran pekerja sosial dalam pendampingan pemberdayaan sosial menurut (Hatu, 2010) yaitu:

1. Sebagai broker: peran broker adalah menghubungkan masyarakat dengan lembaga-lembaga atau pihak-pihak yang masih berkesinambungan dengan produk dan layanan yang diperlukan oleh masyarakat (*goods and services*) serta mengontrol kualitas produk dan layanan barang yang diberikan lembaga (*quality control*).
2. Sebagai mediator: paradigma generalis merupakan peran yang cukup penting. Peran mediator menjadi sangat penting ketika muncul perbedaan pandangan yang nyata antara berbagai pihak yang berpotensi menimbulkan konflik. Pekerja sosial berperan sebagai "kekuatan penengah" untuk memfasilitasi hubungan

antara anggota kelompok dan sistem lingkungan yang menjadi hambatan bagi mereka.

3. Sebagai advokat: salah satu jenis dari pekerjaan sosial yang bersentuhan dengan kegiatan politik merupakan peran dari advokasi. Tugas seorang advokat terbagi menjadi dua jenis: pembelaan individual (case advocacy) dan pembelaan berbasis isu atau kelompok (cause advocacy). Ketika pekerja sosial membela hak atau kepentingan satu orang klien secara personal, ia menjalankan fungsi sebagai pendamping kasus. Sementara itu, jika yang dibela adalah komunitas atau kelompok masyarakat, maka ia sedang melakukan pembelaan terhadap isu yang lebih luas dan bersifat kolektif.

